

**Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Dalam Menangulangi Pengemis Jalanan**

Dosen pengampu: Intan Fitri Meutia, S.A.N,M.A, Ph.D

(Ujian Tengah Semester)

**Oleh :
Sabrini Hayati
2216041129**



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dalam Menangulangi Pengemis Jalanan

Oleh

Sabrini Hayati

Pengemis merupakan masalah sosial yang timbul sebagai dampak negatif dari kemiskinan, namun saat ini penyebab munculnya pengemis menjadi semakin kompleks, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi satu-satunya penyebab munculnya pengemis. Oleh karena itu, pengemis merupakan masalah sosial yang relevan untuk terus dikaji. Pembinaan pengemis adalah tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung tentang pembinaan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas umum Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung memiliki program sebagai berikut: usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan usaha rehabilitasi sosial. Program ini bertujuan untuk meminimalisir penambahan jumlah pengemis di kota Bandar Lampung. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: “Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Menangulangi Pengemis Jalanan?”. Tujuan dari penelitian ini adalah: “untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangulangi pengemis. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, timbulnya pengemis dilatar belakang oleh dua faktor yaitu faktor internal yang meliputi kemiskinan individu maupun keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta sikap mental. Dan faktor eksternal yang meliputi kondisi permisif dikota, urbanisasi, tidak adanya lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan. Dinas Sosial kota Bandar Lampung belum berfungsi dengan baik dalam pembinaan pengemis di Kota Bandar Lampung, karena masih ada upaya-upaya yang belum terealisasi oleh Dinas Sosial dalam upaya pembinaan pengemis, faktor utama yang menjadi penghambat adalah anggaran yang kurang mencukupi serta Dinas Sosial tidak memiliki panti untuk melakukan pembinaan.

Keyword: Pengemis, Strategi, dan Dinas sosial

ABSTRACT

Bandar Lampung City Social Services Strategy In Tackling Street Beggars

By

Sabrini Hayati

Begging is a social problem that arises as a negative impact of poverty, but currently the causes of the emergence of beggars are becoming increasingly complex, so that poverty is no longer the only cause of the emergence of beggars. Therefore, begging is a social problem that is relevant to continue to be studied. The development of beggars is a task as developed by the Bandar Lampung city government regarding community development and welfare. Where the Social Service is a government institution that carries out the general tasks of Regional Government in the field of social welfare in accordance with applicable laws and regulations. The guidance for beggars carried out by the Bandar Lampung City Social Service has the following programs: prevention efforts, mitigation efforts and social rehabilitation efforts. This program aims to minimize the increase in the number of beggars in the city of Bandar Lampung. The problem that the author discusses in this thesis is: "Strategy of the Bandar Lampung City Social Service in Handling Street Beggars?". The aim of this research is: "to find out what strategies the Bandar Lampung City Social Service uses to deal with beggars. This research is descriptive in nature, with a qualitative approach. Based on the results of this research, the emergence of beggars is motivated by two factors, namely internal factors which include individual and family poverty, low levels of education, and mental attitudes. And external factors include permissive conditions in cities, urbanization, lack of job opportunities, and development gaps. The Bandar Lampung City Social Service has not functioned well in developing beggars in Bandar Lampung City, because there are still efforts that have not been realized by the Social Service in efforts to develop beggars, the main factors that are obstacles are the insufficient budget and the Social Service not having an orphanage. to carry out coaching.

Keywords: Beggars, Strategy, and Social Services

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini dengan judul: “Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengemis Jalanan”. Sholawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, juga pada para pengikut sunah-sunahnya. Tugas Penelitian ini diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester. Penulis menyadari bahwa dalam penulisa karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

DAFTAR ISI:

BAB. I. PENDAHULUAN	6
Latar Belakang.....	6
Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
Tujuan	Error! Bookmark not defined.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
Penelitian Terdahulu	12
Tinjauan Umum	17
Kerangka Pikir.....	20
BAB. III. METODE PENELITIAN	20
Pendekatan dan Metode Penelitian	20
Metode Pengumpulan Data.....	20
Fokus penelitian.....	21
Teknik Pengumpulan Data	22
Uji Keabsahan Data.....	23
Lokasi penelitian.....	24
BAB. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
Propil Kota Bandar Lampung	26
Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	27
Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	27
Hasil Penelitian	28
Pembahasan Hasil Penelitian.....	31
BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
Kesimpulan.....	34
Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pengemis dan gelandangan khususnya di Kota Lampung adalah permasalahan yang mendesak, sebagaimana terlihat bahwa jumlah pengemis dan gelandangan pada pertokoan, jalan raya serta fasilitas umum seperti taman, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Lampung belum secara tegas menerapkan sanksi terhadap pengemis dan gelandangan yang berkeliaran dan juga yang terjaring razia, sehingga tidak ada efek jera dari mereka untuk tidak kembali mengemis. Maka dari itu dapat diketahui implementasi perda mengenai ketertiban sosial belum sepenuhnya di laksanakan dengan optimal.

Untuk lebih menjelaskan ketegasan pemerintah daerah Kota Lampung, dalam permasalahan pengemis ini di jelaskan bahwa pada perda nomor 03 tahun 2010 tentang ketertiban sosial terdapat pasal 29 mengatur pemberian sanksi kepada gelandangan dan pengemis serta masyarakat yang melanggar ketentuan dari pasal 3 dan 1, yaitu “barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 peraturan daerah ini dicancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupia. Tetapi dalam kenyataannya belum dapat di jalankan dengan optimal melihat bahwa pemberian suatu barang dalam bentuk uang dan benda kepada pengemis dan gelandangan ialah hak masyarakat yang terkadang memang sebab kasihan, tetapi hal tersebutlah yang menjadikan keberadaan pengemis dan gelandangan di Kota Lampung menjadi semakin berkembang, tindakan sanksi yang di jelaskan di atas tidak dapat di terapkan sanksi seperti diatas, maka dari itu perlu melainkan tindakan penjarangan, pemulangan atau pembinaan serta peningkatan kemampuan.

Pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu cara memandang bahwa semua masyarakat tidak terkecuali gelandangan ataupun pengemis yang di bina oleh pemerintah daerah dimana di dalamnya terdapat dasar-dasar seperti keadilan dan ketertiban untuk

semua masyarakat negara Indonesia yang merupakan nilai-nilai Pancasila dan UUD. Maka dari itu sangat perlu sebuah tindakan yang lebih nyata dalam penyelesaian masalah kenteraman dan ketertiban ini yaitu dengan melakukan pembinaan kepada pengemis, agar gelandangan dan pengemis yang dibina dapat hidup lebih baik dan bergabung menjadi warga Lampung yang bermartabat.

Pada kenyataannya pelaksanaan penindakan gelandangan dan pengemis di Kota Lampung melalui instansi terkait yaitu Dinas Sosial dalam pelaksanaannya belum bisa menyelesaikan permasalahan pengemis dan gelandangan di Kota Lampung. Beberapa kegiatan telah dilakukan seperti razia bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan para pengemis dan gelandangan dengan harapan dapat memberikan kesadaran bagi mereka, tetapi setelah dilakukan penjaringan dan pembinaan awal dari Dinsos Kota Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja terlihat masih banyak pengemis dan gelandangan yang kembali ke jalan raya dan melakukan aktivitas meminta ditempat umum. Menurut Bungin (2021), dalam Peraturan Daerah no 2 tahun 2008 dalam artian oleh Pembinaan Anak, pengemis diartikan sebagai berikut:

Pengemis merupakan sekelompok orang yang bertindak atas nama lembaga social untuk mendapat penghasilan dengan cara memintaminta di jalanan atau tempat umum dengan beragam cara dengan memberi ragam alasan guna mendapat belas kasih dari semua orang. Pengemis Usia Produktif merupakan pengemis yang memiliki rentang umur antara 19-59 tahun dan pengemis tersebut tergolong atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan. Pengemis Usia Lanjut merupakan seorang pengemis berumur 60 tahun ke atas.

Menurut (Dituneik, 2014) MAKAS Pengemis merupakan sekelompok orang yang dalam mendapat penghasilan menggunakan caranya dengan cara memintaminta di depan khalayak umum dengan menggunakan berbagai cara serta alasan sembari mengharap belas kasihan dari orang lain (Tira et al.2012). Pengemis juga merupakan orang-orang yang mendesak karena tidak ada bantuan dari lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai (Siregar, 2003), bukan karena malas untuk mencari mata pencaharian yang layak, tapi juga rendahnya lowongan kerja serta keterbatasan dari diri mereka masing-masing (Sugiyono, 2009).

Dalam buku Ali Yafie, Muthalib dan Sudjarwo memberi tiga gambaran umum mengenai pengemis, yaitu:
Pengemis adalah sekelompok orang miskin atau sekelompok orang yang dimiskinkan oleh masyarakat
Pengemis merupakan seorang yang dikucilkan dan disingkirkan oleh tiap orang. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan.

Menurut Waluyo (2002), profesi pengemis merupakan profesi yang sudah biasa dan sudah sangat umum bagi pandangan masyarakat luas (Radarmadiunweb et al., 2012). Di Indonesia terutama di kota besar Khususnya kota DKI Jakarta seorang yang ekonominya tidak cukup dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya pun terpaksa memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang pengemis (Wismoyojati et al., 2012). Tidak hanya di DKI Jakarta (Wakoranews, 2002), bahkan kita dapat menemui beberapa pengemis di kota Lampung dengan jumlah yang banyak. Mereka sangat menggantungkan hidup mereka di jalanan karena kurang beruntung untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Berkaitan dengan itu, tidak terlepas di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berdirinya perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran dan sarana hiburan yang memikat masyarakat desa maupun setempat untuk mengadu nasib di Kota Bandar Lampungⁱⁱ. Namun pada faktanya laju arus urbanisasi tidak seimbang dengan lapangan kerja, pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial diantaranya yaitu kemiskinan. Akibatnya sebagian anggota masyarakat rela berada ditempat-tempat umum untuk melakukan kegiatan mengemis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2016-2018 jumlah pengemis sebagai berikut.

Tabel.1

Jumlah Pengemis Tahun 2020-2022:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	126 orang
2	2021	88 orang
3	2022	96 orang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya populasi pengemis di kecamatan yang terdapat pada tabel di atas. Menurut amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980, maka pada tahun 2010 pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 'disebutkan bahwa: 18 pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak.

Faktor-Faktor yang menimbulkan tumbuhnya Pengemis menurut Dimas Dwi Frawan yaitu:

Melakukan tindakan urbanisasi dan atau transmigrasi dengan semangat yang tinggi tanpa perhitungan yang jelas. Tunawisma dan kaum papa yang selalu berdiri di perempatan atau pinggir jalan secara khusus di kota-kota besar, banyak berasal dari desayang bermimpi sukses di kota tetapi tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bersaing berusaha dan mencoba dengan kemampuan yang ada tetapi karenamentalnya tidak sekuat baja dan keterampilan atau pengetahuan terbatas, tanpa tempat tinggal yang menetap membuat mereka pasrah di kota dan memilih menjadi jalur cepat agar dapat makan sebagai pengemis dan tunawisma.

Malas Berusaha Perilaku malas bekerja/berusaha menjadi faktor yang menumbuhkan banyaknya, tunawisma dan golongan papa. Berpikir gampang mendapatkan uang tanpa usaha, dan ingin enak saja tanpa capek karena hanya modal mengangkat tangan, membuat mereka tidak malu memilih perbuatan itu.

Cacat Fisik Kondisi fisik yang tidak lengkap dan tidak sama dengan orang normal dapat mendorong individu memilih menjadi pengemis untuk pekerjaannya. Terbatasnya pekerjaan yang layak bagi disabilitas membuat mereka bertahan hidup dengan cara mengemis

Tidak Adanya Lapangan Pekerjaan Sulitnya mencari kerja, dengan keterbatasan pengalaman akademis membuat mereka berpikir pekerjaan yang tepat adalah mengemis

Tradisi Yang Turun Temurun. Tindakan mengemis dan berstatus tunawisma sebenarnya telah ada sejak dahulu dan turun-temurun

peristiwa yang sama terjadi di zaman anak cucu
Mengemis Dari Pada Menganggur. Mental membenaran dari pola pikir
lebih baik mengemis dari pada menganggur mereka mau membuat
mengemis dan menjadi tunawisma daripada jadi berbuat jahat.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi apa yang dilakukan dinas sosial kota Bandar
Lampung dalam menanggulangi pengemis jalanan

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan dinas sosial kota
Bandar Lampung untuk menangani pengemis di jalanan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan dan sebagai bahan perbandingan, supaya tidak terjadi pengulangan hasil penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun lainnya, sehingga dengan ini peneliti menguraikan karya ilmiah atau skripsi yang sama terkait strategi dinas sosial dalam menanggulangi pengemis di jalanan. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu.

1. Implementasi Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis Di Kota Tangerang (Aji Dewantoro, 2019).

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mereka ini hidup dengan cara berpindah tempat atau ada juga yang bergelandangan di pinggir jalan maupun di tempat-tempat yang kumuh sekalipun. Keberadaan pengemis di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan raya, mereka juga merusak keindahan kota.

Oleh sebab itulah, apabila masalah pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Ada beberapa dampak adanya pengemis yang paling menyita perhatian adalah terganggunya ketertiban lingkungan, meningkatnya

tindakan kriminal, bertambahnya angka pengangguran, serta image daerah kota yang terkesan kumuh dan tidak tertata dengan baik. Dan tidak sedikit kasus kriminal yang dilakukan oleh mereka, seperti mencopet bahkan mencuri dan lain-lain. Hal tersebut sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Kota Tangerang seperti di daerah Tangerang.

Terkait hal tersebut banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk menangani mereka, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum, yang diharapkan dapat membuat jera para pengemis karena tidak ada yang memberi dan juga dengan pembagian makanan untuk keluarga miskin, sampai dengan operasi penggarukan, yaitu metode pengangkutan dan pemindahan paksa para pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Pada kenyataannya, upaya-upaya tersebut kurang efektif dan bahkan dinilai tidak mampu mengendalikan laju pengemis yang tiap tahun semakin menjamur.

Untuk mengatasi pengemis, pemerintah Kota Tangerang mengutus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merazia semua pengemis yang ada diseluruh sudut Kota Tangerang, untuk kemudian dijaring dan ditampung oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kota dari pengemis, serta berupaya untuk memberikan penyadaran kepada mereka..

2. Peran Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan

Di Koata Pekanbaru (Hafiz Saputra Hasan,2020)

Dalam era globalisasi Dan krisis yang melanda Negara republik Indonesia mengakibatkan meningkatnya masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk seseorang yang hidupnya menggelandang, meminta minta tanpa memiliki tempat tinggal secara tetap.

Gelandangan dan Pengemis boleh dikatakan bagaikan dua keping mata uang yang tidak terlalu jauh dalam hal perbedaan, karena keduanya secara fungsional bisa terjadi dalam saat yang bersamaan. Gelandangan bisa sekaligus menjadi pengemis, demikian pula pengemis bisa menjadi gelandangan. Gepeng menjalani hidupnya dengan mengharap belas kasihan dari orang lain dengan cara mengemis atau mengamen. Gepeng mempunyai tempat tinggal di kolong jembatan, stasiun kereta api dan membangun gubuk liar di tepi sungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan keamanan lingkungan masyarakat.

Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kota Pekanbaru gencar melakukan razia terhadap orang gila dan gelandangan. Razia yang dilakukan sejak dua minggu terakhir berbuah hasil. Sebanyak 10 orang diduga gila dan gelandangan berhasil diamankan petugas. Razia dilakukan di sejumlah wilayah yang kerap dijadikan tempat mangkal anak jalanan dan tempat berkeliarannya orang gila, seperti di Pasar kiran dan Pasar Porong.

Mereka dapat ditemui diberbagai pertigaan, perempatan, lampu merah dan tempat umum, bahkan di kawasan pemukiman, sebagian besar dari mereka menjadikan mengemis sebagai profesi. Hal ini tentu sangat mengganggu pemandangan dan meresahkan masyarakat. Penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik.

Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial.

Hidup bergelandangan tidak memungkinkan orang hidup berkeluarga, tidak memiliki kebebasan pribadi, tidak memberi perlindungan terhadap hawa panas ataupun hujan dan hawa dingin, hidup bergelandangan akan dianggap hidup yang paling hina diperkotaan. Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan.

3. Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 (Himami Firdaus, 2020)

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mengalami permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh badan pusat statistika, jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai 28,28 juta jiwa atau sekitar 11,25% dari jumlah keseluruhan penduduk di indonesia. Kemiskinan yang terjadi di indonesia di sebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor penyebab kemiskinan tersebut antara lain memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan untuk berusaha, dan kurang tersedianya lapangan kerja.

Berdasarkan faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi di indonesia erat kaitannya penduduknya tidak bekerja atau menganggur dan sebaliknya penduduk yang tidak bekerja disebabkan karena kemiskinan, yang mana penduduk tersebut tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keterampilan secara maksimal sebagai modal mendapatkan pekerjaan. Dalam persaingan untuk mendapat pekerjaan, terdapat orang-orang yang tersingkirkan yang berdampak pada terjadinya pengemisan. Orang-orang yang tersingkirkan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya entah menjadi pengemis, pengamen, gelandangan, pemulung dan lain-lain.

Pada umumnya mereka berusia muda dan masih produktif namun

mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sesuai kemajuan perkembangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat semakin meningkat, namun pengelolaan dan pelayanannya belum semua dilaksanakan secara professional. Pemerintah telah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang telah tersebar di seluruh tanah air. Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” pemerintah pusat sangat berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar untuk ikut serta memprakarsai secara langsung tanpa harus menunggu kebijakan dan komando program-program formal dari pemerintah pusat.

Semakin banyaknya orang-orang yang tidak mendapat kesempatan hidup secara layak, anak-anak jalanan yang tinggal di rumah-rumah kardus dan dibawah kolong jembatan serta pengangguran-pengangguran baru yang jumlahnya meningkat tajam, telah menggambarkan betapa parahnya kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi setiap bangsa, tidak ada satupun Negara di dunia yang bebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang.

2.1. Tinjauan Umum

2.1.2. Tinjauan Umum Strategi

Menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan bahwa strategi adalah

rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Dan menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002) “Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya”.

Berdasarkan berbagai definisi tentang strategi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pengintegrasian keunggulan dan alokasi sumber daya yang ada di perusahaan.

2.2.2. Tinjauan Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan satuan pelaksana pelayanan sosial kepada masyarakat di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan kementerian yang melayani pemenuhan kebutuhan sosial dan menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dinas Sosial adalah perangkat yang melaksanakan penanganan masalah di bidang sosial dalam cangkupan pemerintah daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan dan tanggung jawabnya secara langsung kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Berdasarkan fungsinya dinas sosial sebagai penyelenggarakan fungsi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan

sosial, serta penanganan masalah fakir miskin di masyarakat. Dinas Sosial memiliki peran yang vital di masyarakat terutama terhadap penanganan-penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

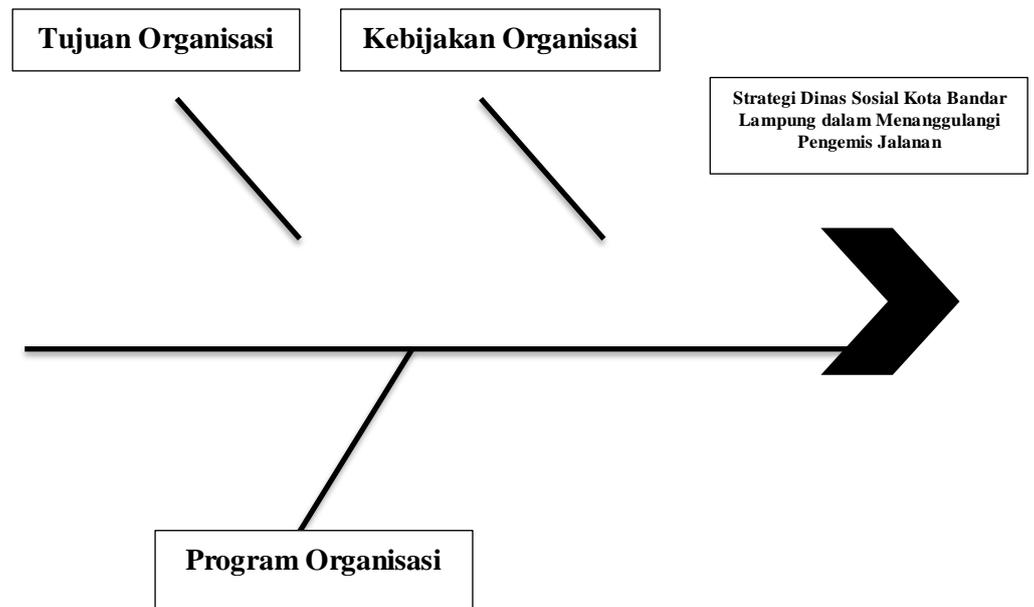
2.3.2. Tinjauan Umum Menanggulangi

Menurut KBBI (2013), menanggulangi berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Menanggulangi adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya menanggulangi dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

2.4.2. Tinjauan Umum Pengemis

Definisi pengemis menurut Cornelius (2017). Pengemis adalah perilaku yang dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan memanfaatkan kondisinya agar mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah tindakan yang senantiasa dilakukan dengan sengaja agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bentuk tidak sosial ini dijalankan oleh seorang anak, ataupun orang dewasa sekalipun yang tujuannya ialah demi mendapatkan untung

2.3. Kerangka Pikir



BAB. III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk menguraikan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Keadaan ini didapat dari observasi, wawancara, serta kebijakan dari dinas sosial kota bandar lampung dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian strategi tersebut.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode observasi dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan pembahasan penelitian dan melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan teori-teori terkait dengan tema penelitian.

3.3. Fokus penelitian

Berdasarkan dari judul yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Strategi dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengemis Dijalanan. Untuk judul tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan teori Quin yang mana mengatakan bahwa strategi yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi akan dikatakan berhasil apabila dilakukan berdasarkan 3 indikator yakni Tujuan organisasi, Kebijakan Organisasi, dan Program Organisasi. Dalam sebuah organisasi tentu memiliki tujuan yang mana tujuan tersebut dicapai dengan membuat suatu program.

Organisasi juga mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat apabila jenis organisasinya merupakan organisasi publik.

a. Tujuan Organisasi Tujuan organisasi merupakan suatu hal yang menjadi pedoman organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Tujuan organisasi juga biasa disebut sebagai penentu arah kemana organisasi akan berjalan nantinya. Tujuan organisasi juga berguna agar kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut tetap dalam porosnya dan

tidak keluar dari lingkup yang seharusnya.

b. Kebijakan Organisasi Kebijakan organisasi merupakan kajian yang merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi untuk mencapai target sasaran yang sudah direncanakan. Kebijakan organisasi bisa saja mengacu pada peraturan lembaga di atasnya.

c. Program Organisasi Aksi utama organisasi merupakan turunan dari sebuah kebijakan organisasi yang nantinya akan diadakan kegiatan kerja yang sudah direncanakan dan sudah dirancang sesuai dengan kesepakatan yang telah disiapkan bersama untuk dilakukan selama periode tertentu. Program dalam suatu organisasi diatur secara terorganisir karena akan menjadi pedoman utama organisasi dalam rangka mencapai sebuah tujuan suatu organisasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Karena pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mana menghasilkan jawaban bersifat deskriptif, sehingga dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

1). Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi sederhana antara dua orang, atau lebih untuk memperoleh jawaban tertentu atas suatu permasalahan. Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pertanyaan dasar dalam penelitian. Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk memahami hal-hal lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena sebagaimana yang benar-benar terjadi di lapangan, dimana hal ini kemungkinan tidak bisa ditemukan melalui observasi dan dokumentasi. Dalam kegiatan wawancara, peneliti dapat dengan mudah mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya. Hal demikian dapat memungkinkan peneliti memperoleh fakta baru dari informan yang menjadi narasumber penelitian.

2). Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung mengenai apa yang akan peneliti angkat dalam penelitiannya ini. Dalam penelitian ini penulis juga turut sebagai participant observation yang dimana penulis mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sedang berlangsung; Itu bisa mencakup teks, gambar, atau rekaman suara seseorang. Dengan menggunakan dokumentasi, para penulis dapat memperoleh informasi, data, atau dokumen yang dapat mendukung proyek riset apa pun seperti arsip-arsip mengenai peraturan pemerintah mengenai pengemis jalanan serta tujuan dari Dinas Sosial itu sendiri.

3.4. Uji Keabsahan Data

Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data untuk pendekatan kualitatif yaitu transferabilitas, uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan kesimpulan yang dicapai setelah perolehan data tersebut akurat atau tidak akurat.

Transferabilitas

Merupakan angka yang menunjukkan ketepatan dan kecocokan hasil penelitian untuk diterapkan dalam suatu populasi. Nilai atau angka ini tergantung pada pemakai dalam populasi, sehingga di situasi yang lain dapat berkemungkinan nilai akan berubah .

Uji kredibilitas

Merupakan pengujian untuk hasil penelitian agar data yang diperoleh pembaca nantinya jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

Dependabilitas

Dependabilitas atau jika dalam pendekatan kualitatif disebut dengan reliabilitas merupakan proses audit terhadap penelitian yang mana penelitian tersebut memungkinkan untuk diulangi penelitiannya.

Proses audit berguna untuk menunjukkan keaslian data peneliti. Proses audit dilakukan oleh dosen pembimbing atau independen.

4). Konfirmabilitas

Pengujian konfirmabilitas dilakukan untuk menguji keobjektifan suatu hasil penelitian. Indikator suatu penelitian dapat dikatakan objektif yakni apabila diakui oleh orang banyak atas isinya. Uji konfirmabilitas biasanya dilakukan bersama dengan dependabilitas

3. 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai strategi dinaas sosial dalam menanggulangi pengemis di kota bandar lampung. Lokasi dalam penelitian ini adalah tempat tempat keramaian seperti lampu merah,

pasar tradisional, terminal dan tempat umum lainnya. Gambaran kejadian tersebut sering peneliti perhatikan sehari-hari banyak di Pasar Way Halim, Pasar Tengah dan Lampu Merah Bypass (Sukarame Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), alasan peneliti mengambil sampel lokasi tersebut karena wilayah tersebut sangat strategis bagi pengemis dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

BAB. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan diuraikan pada bab ini merupakan data hasil dari wawancara mendalam, observasi terkait Strategi Dinas Sosial Untuk Menangani permasalahan Pengemis Jalanan Di Bandar Lampung, Kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep sehingga nantinya akan menjawab penelitian ini. Untuk menjelaskan Strategi Dinas Sosial Untuk Menangani permasalahan Pengemis Jalanan Di Bandar Lampung, menggunakan konsep Strategi menurut Quinn yang melihat konsep Strategi dari tiga Indikator, yaitu: Tujuan Organisasi, Kebijakan Organisasi, Program/Aksi Utama Organisasi.

Alasan peneliti menggunakan konsep strategi menurut Quinn ialah karena melihat dari aspek- aspek indikator yang mana sebuah pemecahan masalah dapat dinilai dari strategi yang dibentuk; Pertama, tujuan organisasi bentuk untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keberhasilan sesuai dengan Visi Misi yang ada, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, kebijakan menjadikan sebuah kajian untuk merujuk pada proses pembuatan keputusan penting untuk mencapai sebuah target dan sasaran yang sudah direncanakan. Ketiga, Program/Aksi Utama Organisasi merupakan turunan dari sebuah kebijakan yang nantinya akan diadakan kegiatan kerja yang sudah direncanakan dan sudah dirancang sesuai dengan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program yang dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan suatu organisasi dalam mencapai sebuah target atau sasaran dari tujuan suatu organisasi.

Sebagai jalan untuk melihat Strategi Dinas Sosial Untuk Menangani Kasus Pengemis Jalanan Di Bandar Lampung, peneliti menggunakan konsep Strategi menurut Quinn yang memuat 3 indikator strategi. Maka Informan penelitian yang cocok dalam permasalahan-permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. *Kedua*, Pengemis Jalanan Kota Bandar Lampung.

4. 1. Profil Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Terletak di lokasi strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatra, kota ini memiliki dampak signifikan dalam jalur transportasi dan distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Sumatra. Penduduk Bandar Lampung terdiri dari dua kelompok utama: orang Lampung asli serta pendatang dari provinsi lain. Provinsi Lampung juga telah menjadi tujuan migrasi penduduk Indonesia, menciptakan keragaman etnis yang kaya. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung mendapat keuntungan dengan pertumbuhan yang lebih cepat dalam bidang pemerintahan, politik, pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung.

Dengan lokasi geografisnya yang sangat menguntungkan, Bandar Lampung memiliki potensi untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, dan internasional. Keindahan alamnya dapat menjadi daya tarik wisatawan, sementara keberagaman etnisnya memberi kekayaan kultural. Dukungan dari wilayah sekitarnya juga mendukung pertumbuhan kota ini.

Berbagai potensi ini telah diakomodasi dalam rencana pembangunan nasional, regional, dan lokal, menggambarkan masa depan yang cerah bagi Bandar Lampung. Perencanaan proaktif diperlukan untuk mengelola perkembangan kota ini. Dengan posisi geografisnya yang menguntungkan, Bandar Lampung memiliki peluang untuk menjadi pusat pertumbuhan dalam sistem ekonomi regional IMS-GT dan menjadi bagian dari koridor ekonomi terbesar di Indonesia, yaitu Sumatra Selatan, Lampung, Banten, dan Jakarta.

Pengembangan pelabuhan panjang menjadi kunci strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung arus barang. Pelabuhan ini

diharapkan dapat menjadi pusat ekspor dan impor terbesar di Sumatra bagian selatan, bersaing dengan pelabuhan Bojonegoro dan Palembang, serta menjadi alternatif pilihan bagi aliran barang domestik dan internasional.

4. 2. Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan undang-undang daerah nomor 24 tahun 1996 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tingkat II, telah terjadi perubahan bentuk dan fungsi lembaga ini. Pelaksanaan peraturan tersebut mengatur tugas jabatan struktural di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan keputusan walikota nomor 19 tahun 1998 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 24 tahun 1996. Seiring dengan pemberian otonomi daerah sejak tahun 1999, yang diatur oleh undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mengalami perubahan lebih lanjut. Hal ini tercermin dalam keputusan walikota Bandar Lampung nomor 30 tahun 2003 mengenai struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

4. 3. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Sosial merumuskan enam misi utama:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada PMKS.
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 3) Memperbaiki penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS di Kota Bandar Lampung.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana, prasarana, dan pendanaan untuk penanganan PMKS dan PSKS serta pembangunan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM yang bekerja di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

6) Memperkuat koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi PMKS, sekaligus meningkatkan kerukunan umat beragama.

4.4. Hasil Penelitian

1). Tujuan Organisasi

Secara umum Quinn dalam buku Faisal Afiff (2011: 170) tujuan organisasi menjadi satu kesatuan dalam memformulasikan sebuah strategi. Dalam mengukur tujuan dari organisasi dapat dilihat dari kinerja organisasi itu sendiri. Menurut Bastian (2001: 329) dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi terdapat sasaran, visi, dan misi organisasi. Tujuan organisasi bentuk untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keberhasilan sesuai dengan sasaran, visi, dan misi yang ada. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial.

FUNGSI

perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan social, pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan social, pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

ORGANISASI DINAS SOSIAL

Sekretariat

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi :

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial. Fungsi koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP); koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kedudukan dan Tugas,

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan

kapasitas fakir miskin, pemberdayaan social penanganan fakir miskin; penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mfasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kebijakan Organisasi

Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan tujuan agar anak jalanan, gelandangan dan pengemis mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Dinas Sosial juga Melakukan upaya rehabilitasi sosial, Dan Dinas sosial juga Usaha pengangulangan bekrjasama melakukan patroli bersama satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Polisi untuk merahazia para pengemis di jalanan.

3. Program Organisasi

Dalam upaya pencapaian tujuan pembinaan, maka Dinas Sosial Menyelenggarakan program yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi sosial.

Usaha pencegahan

Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan dan pengmeis. Usaha sebagaimana dimaksud dilakukan antara lain dengan:

Pendataan;

Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial dan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan cara menyiapkan instrument pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakan kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status kluarga dan masalah pokok yang dihadapi. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan; Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh dinas sosial dan ata bekerja sama dengan

instansi terkait serta unsure masyarakat dengan cara:

1. Melakukan patroli ditempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandar Lampung
2. Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas ditempat umum secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

c. Sosialisasi;

Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi sosial, yang meliputi:

- Sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak maupun media elektronik.

d. Penyuluhan

Penyuluhan bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang mengikut sertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi maupun pemasangan rambu-rambu tentang memberi uang di jalan. Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerja sama dengan instansi terkait serta unsure masyarakat (perseorangan, keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.

4. 5. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Dinas Sosial Bandar Lampung Faktor penyebab maraknya Pengemis Jalanan adalah karena himpitan ekonomi. Beberapa pengemis mencari uang dijalan. Karen tingginya angka pengangguran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori konsep Strategi menurut Quinn yang

memuat 3 indikator strategi yakni (*tujuan organisasi*), (*kebijakan organisasi*), dan (*program organisasi*). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menangani pengemis jalanan. Konsep strategi merupakan rencana terencana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang meliputi tujuan, kebijakan, dan program yang dikeluarkan.

Tujuan Organisasi. Tujuan organisasi merupakan suatu hal yang menjadi pedoman organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Tujuan organisasi juga biasa disebut sebagai penentu arah kemana organisasi akan berjalan nantinya. Tujuan organisasi juga berguna agar kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut tetap dalam porosnya dan tidak keluar dari lingkup yang seharusnya.

Kebijakan Organisasi. Kebijakan organisasi merupakan kajian yang merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi untuk mencapai target sasaran yang sudah direncanakan. Kebijakan organisasi bisa saja mengacu pada peraturan lembaga di atasnya.

Program Organisasi Aksi utama organisasi merupakan turunan dari sebuah kebijakan organisasi yang nantinya akan diadakan kegiatan kerja yang sudah direncanakan dan sudah dirancang sesuai dengan kesepakatan yang telah disiapkan bersama untuk dilakukan selama periode tertentu. Program dalam suatu organisasi diatur secara terorganisir karena akan menjadi pedoman utama organisasi dalam rangka mencapai sebuah tujuan suatu organisasi.

Wujud nyata pemerintah dalam upaya melindungi dan mensejahterakan masyarakat diantaranya adalah kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan sebuah pembinaan dan pelatihan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka mengurangi masalah kesejahteraan sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat khususnya kepada para pengemis yang ada di jalanan, maka perlunya dilaksanakannya program rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya kepada para pengemis.

BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN

5 .1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut: Beberapa faktor penyebab terjadinya pengemis ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah faktor yang datangnya dari diri si pengemis sendiri, faktor internal meliputi kemiskinan baik dari individu maupun keluarganya, rendahnya pendidikan yang cenderung mengakibatkan rendahnya ketrampilan, dan sikap mental si pengemis yang menganggap menjadi pengemis adalah pekerjaan yang sah-sah saja untuk dilakukan.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar, yaitu meliputi kondisi permukiman masyarakat yang kemudian dimanfaatkan kebaikannya untuk kemudian setiap hari meminta belas kasihannya, serta urbanisasi dan kesenjangan pembangunan yang terjadi di desa dan di kota. fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis di Kota Bandar Lampung sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Sosial yang hanya sekedar menertibkan saja. Namun dalam segi pembinaan yang tertulis dalam Perda, masih bekerja sama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini dikarenakan kurangnya sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan.

5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis berikan saran bagi Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis di kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Dengan keterbatasan dana, dan sarana Dinas Sosial Kota Bandar

Lampung harus memberikan solusi agar bisa lebih mengoptimalkan pembinaan terhadap pengemis.

2. Dinas Sosial kota Bandar Lampung harus lebih tegas terhadap pengemis yang terjaring lebih dari satu kali dan masih melakukan kegiatan pengemis agar di berikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(3), 132-141.

Yan, A. A. (2021). STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

Nurul, V. C. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Pertiwi, R., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & Firmanto, A. A. ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

Edy Suandi Hamid, 2017:1.20 *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Universitas Terbuka

Hidayat, S.1979.Pembinaan Perkotaan di Indonesia:Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan. Bina Aksara.Jakarta.

Tuhuteru, A. C. (2022). *Peran Dinas Sosial Terhadap Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Haryani, P. (2022). *EVALUASI PROGRAM ASISTEN REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) DINAS SOSIAL KOTA BEKASI DALAM MEMBERDAYAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BEKASI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi).

Afra, N. (2020). *Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Yolanda, M. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA PROBOLINGGO (STUDI PEMBERDAYAAN PENGAMEN DAN PENGEMIS). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(3), 218-226.

Lutfiani, A. D. S. A. (2020). *PERILAKU BERAGAMA PENGAMEN JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Hasan, H. S. (2021). *Peranan Dinas Sosial Dalam Membina Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Bartal.1976. *Pembinaan Sosial*. Jakarta Rineka Cipta.v